

BAB I

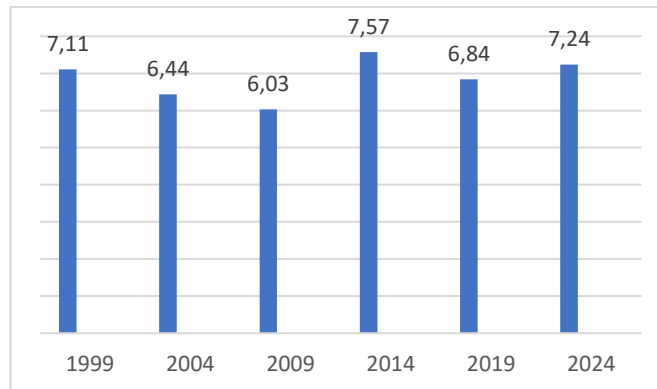
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik (Parpol) merupakan salah satu lembaga formal politik resmi di dalam pemerintahan modern. Kedudukan Parpol tentunya memiliki pengaruh berbeda di negara demokrasi dan negara otoriter, dimana kehidupan politik yang dijalani negara demokrasi lebih memperjuangkan kepentingannya sebagai wadah warga negara dihadapan penguasa, sedangkan di negara otoriter lebih menjalankan kehendak penguasa. Fungsi Parpol di negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Parpol menjadi urat nadi kehidupan negara modern yang demokratis karena menjadi suatu wadah aspirasi masyarakat sehingga bisa berpengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan negara (Budiarjo, 2018; Suryanto, 2016).

Dinamika Parpol dalam sebuah Pemilu, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), perjalanan politik dimulai pada tahun 1999, dimana ia mendapatkan kursi sebanyak 35 kursi atau 7,11% suara dari total Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adapun perolehan suara PAN di DPR-RI pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Perolehan Suara PAN Pada Pemilu Legislatif DPR-RI 1999-2024



Sumber data: Kompas data 2024 (Perubahan politik Partai Amanat Nasional Menuju Pemilu 2024)

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa perolehan suara dalam setiap pemilu yang dilakukan dari tahun 1999-2024 mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang terjadi. Sedikit atau banyak dinamika partai di daerah maka berpengaruh juga pada akumulasi partai secara nasional. Faktor utama yang mempengaruhi suara partai adalah sosok kepemimpinan partai itu sendiri. Maka, dari hal tersebut menjadikan partai ini butuh sosok pemimpin yang populer dikalangan masyarakat sehingga ketika sosok M.Amien Rais sudah tidak ada lagi di jajaran partai pada saat Pemilu tahun 2019 maka partai PAN melakukan perubahan yang mencolok, dimana ketua umum partai berada di tangan Zulkifli Hasan pada periode 2015-2020 dan periode 2020-2025.

Partai berlambang matahari ini memutuskan untuk menjembatani antara pemerintah dan para tokoh islam untuk bergabung ke dalam pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa sebuah kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Zulkifli Hasan, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PAN menawarkan tradisi baru dengan adanya otonomisasi. Dimana

kekuasaan PAN dibangun tidak sentralistik melainkan sistem struktur partai secara desentralisasi. Hal ini sejalan dengan langkah baru setiap pengurus daerah mempunyai masing-masing wewenang sehingga bukan lagi atas kehendak ketua umum. Dengan struktur organisasi yang desentralistik, variasi kekuatan PAN antardaerah merupakan konsekuensi dari tingkat institusionalisasi lokal, salah satunya kekuatan partai PAN di Kabupaten Ciamis.

Dinamika yang terjadi pada proses Pemilu selama periode 2014, 2019, dan 2024 PAN masih terus mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu Parpol yang mendominasi di Kabupaten Ciamis, meskipun antara periode 2014 ke 2019 adanya penurunan jumlah suara sebesar 31.524 suara, akan tetapi pada periode 2024 angka tersebut naik kembali dengan kenaikan sebesar 16.985. Rincian tersebut ada pada gambar 1.2

Tabel 1.1

Suara PAN Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ciamis

Periode	Dapi 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
2014	22.628	12.437	12.941	17.708	24.967	24.127	114.808
2019	14.194	5.593	28.746	10.218	17.089	7.444	83.284
2024	21.255	14.262	21.889	14.389	13.273	15.201	100.269

Sumber data: KPU Kabupaten Ciamis 2014, 2019, dan 2024, dan data olahan penulis

Eksistensi PAN di Kabupaten Ciamis bisa dikatakan masih stabil untuk menjaga suara atau konstituennya dengan jumlah suara 100.269. Apabila melihat kondisi PAN di Kota Banjar hanya memperoleh total suara 5.051 dan Kabupaten Pangandaran memperoleh jumlah suara 21.471 (Times Indonesia, 2024; KPU Kota Banjar, 2024).

Fenomena komposisi anggota DPRD terpilih dari PAN periode 2024–2029 mencerminkan pola rekrutmen yang memadukan kader ideologis dan aktor ekonomi. Dalam penomoranurut Caleg PAN dalam berita dijelaskan tidak ada konflik internal, meskipun kondisi tersebut menjadi momentum konflik internal, akan tetapi PAN Kabupaten Ciamis bisa merealisasikannya dengan kondusif. Untuk penomoranurut Caleg ada dalam tabel 1.1. PAN memperoleh tujuh kursi, dimana secara latar belakang Dewan terpilih, penulis mewawancarai bersama Rina Herlina¹, dia mengatakan secara latar belakang Dewan terpilih yakni Anggia merupakan pengusaha kontraktor, Yoyo dan Ramli merupakan mantan kepala desa, Komar, Sarkum, dan H.Eson merupakan pengusaha Ayam, dan Asep merupakan direktur Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon dan mempunyai rumah makan Mulyasari di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Komar, Sarkum dan Eson merupakan *Incumbent* pada periode sebelumnya, Dewan terpilih didominasi latar belakang dari pengusaha. Disatu sisi calon terpilih juga hanya tiga Dewan yakni Komar, Sarkum, dan H.Eson yang merupakan hasil kaderisasi PAN sedangkan empat Dewan yang terpilih lainnya bisa dikatakan pendatang baru yang hadir di PAN. Terdapat kader baru yang memperoleh suara terbanyak yakni Anggia Herfianti dapil 1 yang mengalahkan *incumbent* Herdy Rusdiawan, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen DPD Partai Demokrat Jabar periode tahun 2017-2022 dan juga pernah menjadi caleg dari Demokrat sehingga hal ini menarik untuk

¹Staf Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Ciamis (wawancara pada tanggal 21 Maret 2024)

dibahas. (Tribun Priangan.com, Ferri Amiril, 2023). Rincian nama-nama Dewan terpilih ada pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Nomor Urut Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Periode
2024-2029

Nomor Urut	Dapil Kabupaten Ciamis					
	1	2	3	4	5	6
1.	Herdy Rusdiawan AMD	Yoyo Wahyono	Komar Hermawan	Eson Suryadi, ST, MM	Taryono Ano aryanto	Sugianto
2.	Salahudin	Endo Spd	Sarkum	Tatang Supena	Gani Adam	Eka Muntaha, S. HI
3.	Anggia Herfianti	Witri Suhesti	Teti Juwarti	Dini Sugiarti	Hj. Ika Mustikasari	Fibi Ledianti
4.	Irpan Nuryadi	Arif Topan	Oon Furkon	Abdul Aziz Hamdani	Agus Tusino	Aziz Risnandar
5.	Uda Pratama	Sanjaya, SE	Sanceng Sumitra	Hendra	Dony	Arif Ma"ruf
6.	Cucu Hanifah	Intan Eka Nur Agna	Lia Rahmalia	Sofwa Marwah	Mia Aningrum, S. kep, Nes	Anisa Sabatini
7.	Deni Suhendra, S.Ag	Rani Mulyani	Rendra Risnandar	Andi Ali Fikri, S. Ag	Herna Suganda	Candra Wiguna
8.	Sofwan, SPd, MM	Dadang Ramdan	Elis Herti Hertini	Surahwan.	Ramli Mahmud, SE.	Asep Rahmat, SH, MM.
9.	Susi Yanti Andayani		Edi Junaedi			
10.	Adang Sudrajat.					

Sumber data sekunder dari Medicom online pada tanggal 15 September 2025

Tabel 1.3
Data Nama Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Yang Terpilih Periode 2024-2029

Dapil Kabupaten Ciamis					
1	2	3	4	5	6
Anggia Herfianti	Yoyo Wahyono	Drs. Komar Hermawan dan H. Sarkum	H. Eson Suryadi, S.T	H. Ramli Mahmudm, S.E	Asep Rahmat, S.H, M.M.

Sumber data: Wawancara dengan Rina Herlina (Staf DPD PAN) pada tanggal 21 Maret 2024

Menjadikan pengusaha atau pebisnis sebagai anggota atau masuk dalam kepengurusan Parpol bukanlah suatu hal yang tabu, karena pada dasarnya pengusaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan akademisi. Mereka mampu menguasai finansial politik, sehingga pengusaha dapat memberikan bantuan-bantuan sebagai modal roda politik. Secara dasar memang hubungan antara pengusaha dengan Parpol sering terjadi dalam proses sistem politik yang ada di Indonesia, apabila posisi pengusaha mengubah idealis partai maka hal tersebut tentunya tidak selaras dengan kepentingan yang mengutamakan permasalahan publik. Hal tersebut tentu menjadi sebuah keuntungan dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Deni² dimana salah satu hambatan yang dialami yakni geografis dan sumber dana. Maka dari itu para pengusaha memiliki jangkauan yang lebih baik dimana karir politik berjalan dengan lancar karena memiliki sumber daya untuk melakukan perjalanan di daerah-daerah yang sangat sulit diakses dan melakukan survei untuk pelaksanaan proyek pemerintah (Mufti, 2013; Deni 2022).

² Dengan judul Pemilu Dan Institusionalisasi Partai Politik Suatu Kajian Politik Terhadap Dinamika Partai Amanat Nasional Maluku Utara Di Awal Reformasi

Selain itu juga persaingan antar kader untuk menjadi sosok pemimpin seringkali dihadapkan dengan modal ekonomi kader untuk menentukan kedudukannya di partai maupun di pemerintahan, alhasil seringkali kader asli partai akan kalah secara kekuatan dengan kader yang berlandaskan pengusaha. Kaderisasi partai memang memiliki fungsi diantaranya untuk mempersiapkan calon pemimpin, kualitas pemimpin, konsisten ideologi, keterlibatan publik, dan antitesis masalah suksesi. Apabila kaderisasi partai tidak berjalan dengan semestinya, maka idealnya Parpol tidak terbentuk melalui paradigma institusionalisme. Permasalahan mengenai kaderisasi juga terjadi pada penelitian yang dilakukan Suaib dkk³, dimana permasalahannya ketika terpilihnya Nur Alam menjadi ketua yang secara latar belakang merupakan kontraktor dari PT. Pertiwi Agung dan PT. Tamalakindo Puri Perkasan yang menjadi proyek-proyek kontraktor di Diknas Sulawesi Tenggara dan Unhali dan di beberapa pemerintah lainnya. Tentu dengan masuknya pengusaha menunjukkan adanya peluang penguatan kapasitas finansial partai, meskipun berpotensi menimbulkan ketergantungan pada elite ekonomi. Akan tetapi disisi lain dalam proses kaderisasi tentu harus memperhatikan urgensi dari loyalitas dan meritokrasi sebagai hal fundamental dalam profesional, hubungan dengan masyarakat, dan sumber daya yang digunakan. Yang membedakan dalam penulisan ini adalah permasalahan antara dominasi pengusaha yang *non-kader* dengan kader PAN sendiri, sedangkan Suaib dkk mempermasalahkan penggunaan sumber daya sebagai bentuk langkah pragmatis PAN di Sulawesi (Waspodo, 2023; Suaib, 2016).

³ Dengan judul Hegemoni PAN Di Sulawesi Tenggara yang ditulis oleh Suaib dkk

Eksistensi suatu Parpol agar bisa terus bersaing dalam suatu kontestasi diperlukan yang namanya paradigma institusionalisasi. Institusionalisasi merupakan proses yang melibatkan kestabilan dalam nilai tertentu sebagai suatu bentuk idealnya suatu partai politik. Kehadiran Parpol dalam Pemilu yang bisa mempengaruhi sistem politik dan masyarakat, sehingga paradigma institusionalisme mampu menciptakan posisi partai politik menggunakan pendekatan ideal bukan pragmatis. Dalam penelitian yang dilakukan Rachmayani dan Arizka ⁴ menjelaskan untuk menciptakan partai politik yang sesuai dengan kondisi sistem politik harus memiliki membangun kekuatan institusi yang demokratis, integritas internal yang kuat, Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) harus mendukung partai politik untuk membentuk jadi dirinya, dan negara bisa hadir membiayai partai politik. Meskipun demikian memang pada dasarnya kondisi partai politik untuk membentuk sebuah kepercayaan dari masyarakat diperlukan kerjasama antara negara, elite politik, dan Parpol (Rahmayani dan Arizka, 2023; Deni, 2022).

Parpol dalam realitas demokrasi dihadapkan dengan kondisi paradoks dimana keberadaanya justru sedang menurun dalam kondisi sosial politik masyarakat, berbanding terbalik dengan kondisi awal reformasi dimana kepercayaan terhadap Parpol sangat tinggi. Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap partai sangat rendah dengan persentase 54% (dari 12 institusi Parpol). Kondisi realitas tersebut sangatlah wajar karena kondisi dimana beberapa kasus belakangan ini terjadi aktivitas politik, konflik, performa partai, dan pelembagaan Parpol diberitakan

⁴ Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

masih tidak dapat memenuhi kondisi idealnya demokrasi. Sehingga perlunya proses institusionalisasi agar kondisi partai bisa terlepas dari kondisi yang sangat buruk. Beberapa kasus yang menyeret PAN adalah Supriatna Gumilar merupakan anggota DPRD Jabar Fraksi PAN terkena kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah NPCI 2021-2023, Sukiman anggota DPR-RI Fraksi PAN terkena kasus suap untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, dan Egi Sudjana yang merupakan calon legislatif dari PAN terjerat kasus makar. Memang beberapa kasus tidak berlangsung di Kabupaten Ciamis, akan tetapi hal tersebut secara tidak langsung memberikan efek untuk kepercayaan masyarakat Kabupaten Ciamis (Kompas, 2019,2021,2024).

Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari peroleh suara PAN di Kabupaten Ciamis. Adapun perolehan suara PAN di Kabupaten Ciamis pada Pemilu legislatif 2014 dimana memperoleh suara sebesar 114.808 suara, memperoleh 7 kursi, dan posisi kedua perolehan suara terbanyak setelah PDI Perjuangan. Adapun perolehan suara partai PAN di Kabupaten Ciamis pada Pemilu legislatif 2019 dimana memperoleh suara sebesar 83.284 suara, memperoleh 5 kursi, dan posisi keempat perolehan suara terbanyak. Selanjutnya perolehan suara partai PAN di Kabupaten Ciamis pada Pemilu legislatif 2024 dimana memperoleh suara sebesar 83.284 suara, memperoleh 7 kursi, dan posisi kedua perolehan suara terbanyak (data sekunder KPU 2014; 2019; 2024).

Urgensi penelitian mengenai institusionalisasi partai. terletak pada pentingnya memahami dinamika kelembagaan partai politik di tingkat lokal

sebagai faktor penentu kekuatan elektoral dan kualitas demokrasi daerah. Proses institusionalisasi partai berpengaruh langsung terhadap kemampuan partai dalam melakukan kaderisasi, konsolidasi organisasi, serta membangun jaringan politik yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas rekrutmen calon legislatif dan perolehan suara dalam pemilu. Kabupaten Ciamis menjadi konteks menarik karena Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan adanya perubahan konfigurasi politik lokal, termasuk pergeseran dukungan terhadap PAN yang sebelumnya menargetkan peningkatan kursi DPRD melalui optimalisasi struktur partai dan penempatan kader potensial. Namun, sejauh mana perubahan tersebut merupakan hasil dari proses institusionalisasi yang kuat atau sekadar strategi elektoral jangka pendek masih perlu diteliti secara mendalam. Dan penelitian ini penting tidak hanya untuk mengisi kekosongan kajian akademik tentang institusionalisasi partai di level kabupaten yang selama ini lebih banyak berfokus pada konteks nasional tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola partai politik lokal, peningkatan kualitas representasi politik, serta stabilitas sistem demokrasi di daerah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pola hubungan antara tingkat kelembagaan PAN dan keberhasilannya dalam kontestasi politik legislatif di Ciamis, sehingga memberikan manfaat baik bagi pengembangan teori politik maupun perbaikan strategi kelembagaan partai di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus yang diambil oleh penulis terkait penelitian ini membahas bagaimana institusionalisasi PAN di Kabupaten Ciamis dalam Pemilu Legislatif 2024 dan melihat bagaimana PAN sebagai salah satu partai

yang mendominasi di Ciamis apakah cara-caranya itu sesuai dengan fungsi kelembagaan atau justru menyimpang dalam menghadapi Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan dalam penelitian ini yakni, Bagaimana Institusionalisasi Partai Amanat Nasional dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui institusionalisasi Partai Amanat Nasional dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Ciamis dan hambatan yang dihadapi dalam institusionalisasi Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Ciamis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan ilmu dan informasi mengenai dinamika partai politik dalam Pemilu;
2. Memberikan pemahaman mengenai institusionalisasi dan partai politik;
3. Memberikan pemahaman mengenai idealnya partai politik dalam sebuah Pemilu;
4. Memberikan referensi untuk penelitian terkait partai politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi untuk sebagai bahan rujukan mengenai dinamika partai politik dalam Pemilu, Institusionalisasi partai politik, dan kaderisasi.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan ilmu dan pengetahuan bagaimana pergerakan partai politik dalam sebuah Pemilu;
3. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi, saran, dan kontrol dari penulis terkait dinamika Parpol dalam Pemilu seperti apa seharusnya kontestasi politik berdasarkan idealnya partai di negara demokrasi